

## **PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PERBATASAN NEGARA DALAM PILKADA SERENTAK DI KABUPATEN MALINAU**

**Semuel Risal**

Politeknik Malinau, Kalimantan Utara, 77554 Indonesia  
[srizal01@yahoo.com](mailto:srizal01@yahoo.com), Telp: +6282159666777

**Eka Pratiwi**

Politeknik Malinau, Kalimantan Utara, 77554 Indonesia

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to describe and analyze the low level of political participation of state border communities as an evaluation of the implementation of the elections held by the Malinau Regional Election Commission in 2015. There is a tendency that border communities do not care about democratic parties (elections) being held, because they feel ostracized by the government, even most of their basic needs depend on neighboring countries, namely Malaysia. While the Indonesian government seems to be ignoring border communities with high living costs and low welfare levels. Giving the impression that the election results also did not have an impact on the lives of the people of the country's borders. Whereas one of the objectives of the implementation of the elections is to produce elections that have clean, honest and fair integrity in order to be able to produce qualified leaders to develop community welfare. The results showed that social, economic, geographical, administrative and community apathy conditions affected the level of political participation of people at the border. Community apathy and geographical conditions have a considerable impact, so the development of border communities needs to be an important concern of the government so that the people trust the government. Thus, the awareness of the people of the national borders to build their participation in determining their leaders in the future elections.

Keywords: *Simultaneous local elections; Political Participation; State Border Society*

### **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan umum merupakan indikator stabilitas dan dinamisnya demokratisasi suatu negara. Di Indonesia, pemilihan umum secara periodik telah dilaksanakan sejak 1955, tetapi proses demokratisasi melalui pemilihan sebelumnya belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang karena sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai muncul setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, yang menyebabkan perubahan dalam tatanan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia.

Peraturan tentang pemerintah di daerah mulai berubah pada tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Setelah diberlakukan selama kurang lebih 5 tahun, UU tersebut kemudian diubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan rezim UU yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah

secara Langsung, yang dimulai pada 2005, di mana sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.

Namun, Pilkada, yang pertama kali diadakan pada Juni 2005, menghadapi masalah kompleks yang menyebabkan anarkisme yang merusak berbagai fasilitas negara hingga penyelesaian perselisihan di Mahkamah Konstitusi. Dari berbagai permasalahan yang muncul, penataan kepemiluan terus diperbaiki hingga diterbitkan Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Kemudian pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang No. 15 tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Perjalanan demokrasi di Indonesia khususnya dalam hal pemilihan di tingkat lokal terus mencari muaranya. Sejak pemilihan langsung mulai digulirkan, aturan tentang kepemiluan juga terus diperbaharui, hingga terbit UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. UU tersebut merupakan konsekuensi dari lahirnya UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu poin pentingnya adalah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada langsung. UU No. 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah salah satu referensi dalam melaksanakan Pilkada yang melahirkan Pilkada serentak, disingkat Pilkada Serentak sejak 2015. Undang-undang ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat tidak hanya datang ke TPS memberikan suara mereka, tetapi yang paling penting adalah bentuk pengawasan pada setiap tahap Pemilu, sosialisasi Pemilu, pendidikan politik untuk Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu.

Ada asumsi bahwa partisipasi politik yang tinggi dari rakyat adalah salah satu indikator berjalannya proses demokratisasi negara yang menganut sistem demokrasi. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai maju dan memahami masalah politik, sehingga ada keinginan untuk berpartisipasi atau melibatkan diri. Partisipasi politik yang tinggi juga menunjukkan bahwa pemerintah yang berkuasa memiliki kadar keabsahan atau legitimasi yang tinggi dari masyarakat. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah dalam masyarakat adalah eksese negatif karena memberikan gambaran bahwa masyarakat tidak peduli dengan masalah kenegaraan. Sehingga jika masyarakat tidak responsif terhadap kebijakan pemerintah, dikhawatirkan akan ada kecenderungan kepentingan politik kelompok untuk mengesampingkan kemauan dan aspirasi rakyat. Situasi politik ini adalah salah satu ciri dari kelemahan kekuasaan pemerintah. Jadi

dapat dikatakan bahwa partisipasi politik rendah, menunjukkan legitimasi terhadap rezim yang berkuasa juga rendah. Partisipasi politik terkait erat dengan kesadaran politik. Semakin sadar seseorang diperintah, semakin kuat keinginan untuk menuntut hak suara dalam pemerintahan.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika hak pilih universal diadopsi di banyak negara, analisis politik cenderung mengasumsikan bahwa orang-orang yang berpendidikan dan lebih mapan secara ekonomi tidak peduli dan tidak ingin terlibat dalam proses pemilihan sebagai bentuk pilihan rasional mereka. Namun, studi empiris menunjukkan bahwa status sosial ekonomi dan pemungutan suara memiliki hubungan positif. Studi Gosnell (1927) tentang pemungutan suara dalam pemilihan presiden 1924 di kota Chicago, menemukan bahwa jumlah pemilih meningkat dengan status ekonomi dan bahwa "orang yang berpendidikan memiliki kecenderungan untuk mendaftarkan diri untuk memilih dalam pemilihan presiden di AS." Bahkan Tingsten (1937) meninjau beberapa studi pemungutan suara di Swiss, Jerman, Denmark, Austria, Amerika Serikat, dan Swedia, yang dilakukan antara tahun 1907 dan 1933, dan merumuskan "aturan umum yang meningkatkan frekuensi suara dengan meningkatnya standar sosial."

Dalam kaitannya dengan Pilkada serentak yang diadakan di 264 daerah pada 2015 di Indonesia mendapat perhatian publik karena tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah. Kabupaten Malinau sebagai salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak tidak luput dari masalah. BPS Kabupaten Malinau (2018) mencatat bahwa dalam pemilu 2015, ada beberapa kecamatan yang tingkat partisipasinya sangat rendah seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Jumlah Wajib Pilih dan Jumlah Suara Sah pada Pemilihan Kepala Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2015**

No	Kecamatan	Jumlah Wajib Pilih	Jumlah Suara Sah
01	Sungai Boh	1.520	1.072
02	Kayan Selatan	1.425	1.210
03	Kayan Hulu	2.276	1.162
04	Kayan Hilir	978	848
05	Pujungan	1.162	948
06	Bahau Hulu	862	730
07	Sungai Tubu	474	379
08	Malinau Selatan Hulu	1.473	1.169
09	Malinau Selatan	2.819	2.287
10	Malinau Selatan Hilir	1.827	1.448
11	Mentarang	3.637	2.827
12	Mentarang Hulu	626	453
13	Malinau Utara	8.018	5.562
14	Malinau Barat	6.585	4.967
15	Malinau Kota	17.351	10.302
<b>Malinau</b>		<b>51.033</b>	<b>35.364</b>

Sumber: KPUD Kabupaten Malinau & BPS Kabupaten Malinau, 2018 (Data diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Malinau adalah 51.033 orang, sedangkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2015 adalah 35.364 orang, atau 69,29% dari total suara wajib pilih. Dari data ini, partisipasi pemilih relatif tinggi, yang hampir mencapai 70%, tetapi ada beberapa kecamatan dengan tingkat partisipasi yang sangat rendah seperti Kecamatan Kayan Hulu dengan jumlah pemilih sebesar 2.276 orang, tetapi partisipasi masyarakat hanya 1.062. orang (46,6%); sementara di Kayan Hilir, dari total wajib pilih 978 orang, terdapat 848 orang datang ke tempat pemungutan suara atau (86,7%) dan merupakan kecamatan dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi dalam pemilihan di Kabupaten Malinau. Padahal kedua kecamatan tersebut sama-sama berbatasan dengan Malaysia. Ada 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia yang dikenal sebagai Apau Kayan yaitu Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Pujungan, dan Kecamatan Bahau Hulu. Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir sangat dekat dengan Malaysia, bahkan intensitas interaksi masyarakat sangat tinggi sementara tiga kabupaten lainnya masih dibatasi oleh hutan belantara. Kecamatan Kayan Hulu adalah kecamatan di perbatasan di mana populasinya cukup besar dibandingkan kecamatan lainnya, tetapi tingkat partisipasi politik masyarakat cukup rendah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015. Sementara tingkat partisipasi politik

masyarakat tertinggi dalam Pemilu 2015 di Kabupaten Malinau adalah Kayan Hilir yang merupakan salah satu Kecamatan di perbatasan.

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan mencakup perbatasan yang begitu panjang. Dalam konteks perbatasan darat, panjang perbatasan antara kedua negara berkisar dari 2.004 km atau 970 mil. Provinsi Kalimantan Utara memiliki 2 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kabupaten Malinau dan Nunukan. Di Kabupaten Malinau, 5 kecamatan berbatasan dengan Malaysia, yaitu Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Pujungan, dan Kecamatan Bahau Hulu. Namun, lokus penelitian ini hanya dua Kecamatan yaitu, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir. Sedangkan lokasi penelitian adalah daerah Apau Kayan, Kecamatan Kayan Hulu di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Apau Kayan adalah daerah di dataran tinggi hulu Sungai Kayan yang terdiri dari enam kecamatan di wilayah ini, yaitu, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan, Sungai Boh, Sungai Boh, Bahau Hulu, dan Mentarang Hulu. Secara geografis wilayah ini berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Kecamatan Kayan Hulu adalah yang paling maju, dengan ibukota di Desa Long Nawang, yang merupakan desa tertua. Desa ini terletak hanya sekitar 40 km dari perbatasan Indonesia-Malaysia. Desa, yang sering disebut sebagai jantungnya Kalimantan (*the Heart of Borneo*), bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Tidak ada rute darat yang memadai dan efisien ke desa tersebut. Selama era kolonial Belanda, Apau Kayan adalah penduduk, hampir di tingkat kabupaten. Posisinya sejajar dengan Bulungan dan Malinau, yang sekarang merupakan daerah otonom, dengan status kabupaten. Ketiga karesidenan tersebut dipimpin oleh seorang kepala distrik atau wedana. Di era Presiden Soekarno, status Apau Kayan, Bulungan dan Malinau statusnya menjadi kecamatan. Raja di daerah tersebut pun gelarnya diganti menjadi kepala adat besar.

Apa yang paling dirasakan di perbatasan adalah jalan yang rusak, akses yang lebih mudah ke negara-negara tetangga, daripada ke ibukota kabupaten. Kecenderungan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi, kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik, dan berbagai kemudahan dan "kepedulian" yang sering ditunjukkan oleh Malaysia dalam jangka waktu lama diyakini oleh sebagian orang telah cukup menarik hati penduduk di sekitar perbatasan. Kondisi ini cukup untuk memberikan "beban tersendiri" untuk pertumbuhan dan pemeliharaan rasa nasionalisme yang menunjukkan bahwa orang-orang di perbatasan memiliki persepsi positif terhadap Malaysia, dalam arti bahwa mereka memandang negara tetangga sebagai jauh lebih makmur dan sejahtera dan belum sebaliknya terhadap Indonesia di wilayah perbatasan.

Sangat ironis, bahwa masyarakat perbatasan di Apau Kayan belum merasakan dampak pembangunan seperti anak-anak bangsa yang tinggal di Jawa. Sementara kekayaan sumber daya alam terus dieksploitasi dari Kalimantan, termasuk Kalimantan Utara seperti kayu bulat, rotan, minyak bumi, mineral, dan batubara, dan sumber daya alam lainnya berkontribusi

besar terhadap devisa negara sebagai modal dasar pembangunan. Namun sumber daya alam yang terus dieksploitasi di Kalimantan sejauh ini, tidak sebanding dengan dampak pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Kalimantan, terutama masyarakat perbatasan. Wilayah Kalimantan kaya akan sumber daya alam, mulai dari hutan hingga bahan tambang seperti batu bara, emas, dan lainnya, seolah-olah hanya menjadi tempat "jarahan".

Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Apau Kayan sampai saat ini adalah jalan akses ke Long Bagun, Kalimantan Timur. Karena hingga saat ini jalan menuju wilayah Kalimantan Timur sepanjang 170 kilometer dari Sungai Boh (Apau Kayan), belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sementara itu, jalan tersebut adalah satu-satunya akses bagi warga negara di perbatasan untuk membeli barang kebutuhan pokok domestik ke Kalimantan Timur. Jika musim hujan tiba, ekonomi masyarakat akan lumpuh, karena jalan akses ke Long Bagun akan rusak parah dengan jalan berlubang dan berlumpur. Sehingga hal yang paling praktis dengan biaya rendah adalah membeli barang-barang pokok ke Malaysia untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perbatasan. Dalam kondisi ini, gaung mewujudkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Apau Kayan terus disuarakan oleh masyarakat perbatasan. Persepsi mereka adalah bahwa melalui DOB, dapat memacu percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Apau Kayan, terutama pembangunan jalan dan jembatan. Karena, terbangunnya akses darat akan memperlancar perputaran perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat perbatasan tidak lagi memiliki ketergantungan pada produk dari negara tetangga Malaysia.

Kondisi di atas mendorong untuk melakukan penelitian di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia karena di satu sisi ada kesadaran publik yang tinggi di kecamatan tertentu di wilayah perbatasan negara untuk memilih para pemimpin, sebagai bentuk nasionalisme yang mendorong partisipasi dalam pemilihan, tetapi pada Di sisi lain, ada kecamatan yang partisipasi masyarakatnya sangat rendah. Bahkan ada indikasi bahwa tingkat partisipasi masyarakat perbatasan rendah karena selama beberapa dekade mereka hidup dalam kondisi terbatas dengan biaya hidup yang tinggi, tetapi perhatian pemerintah masih sangat minim sehingga kehidupan mereka sebagian besar bergantung pada negara tetangga Malaysia. Pada akhirnya sikap skeptis dan apatis terbagun di masyarakat perbatasan yang tidak lain mereka adalah patok hidup perbatasan negara yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.

## **B. PARTISIPASI POLITIK**

### **Konsep Partisipasi**

Partisipasi politik merupakan aspek penting dari demokrasi. Partisipasi politik adalah ciri modernisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara mengikuti dan memahami masalah politik. Tingkat partisipasi yang rendah umumnya dianggap pertanda buruk karena dapat diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian pada masalah kenegaraan (Budiardjo, 1982). Keith Fauls dalam Damsar (2012)

mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintah. McClosky (1962) sebagaimana dikutip Budiarto (1982) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela warga negara melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan otoritas, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dengan demikian partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah dalam pemilihan pemimpin yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

#### **Tipologi Partisipasi Politik**

Rahman (2007) menyatakan bahwa secara umum tipologi partisipasi dapat dibagi menjadi (1) partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output; (2) partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang hanya berorientasi pada keluaran, dalam arti hanya mematuhi peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan keputusan pemerintah apa pun; (3) kelompok golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena mereka menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif terletak pada input dan output politik. Sedangkan partisipasi pasif terletak pada output. Selain itu, ada anggapan masyarakat bahwa dari sistem politik yang ada dinilai menyimpang dari apa yang dicita-citakan sehingga lebih menjurus ke dalam partisipasi politik yang apatis. Pemberian suara dalam Pilkada merupakan salah satu wujud partisipasi dalam politik yang biasa.

#### **Bentuk Partisipasi Politik**

Bentuk partisipasi politik yang diajukan oleh Almond dalam Mas'ood (2011) dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: (1) partisipasi politik konvensional, yang berpartisipasi dalam bentuk pemberian suara atau voting, diskusi politik, kampanye kegiatan, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan komunikasi individu dengan pejabat politik atau administrasi; (2) Partisipasi politik non-konvensional, yang berpartisipasi melalui penyerahan petisi, demonstrasi, konfrontasi, pemogokan, tindakan kekerasan politik terhadap properti, seperti: perusakan, pemboman, pembakaran; dan tindakan kekerasan politik terhadap manusia, seperti penculikan, pembunuhan, perang gerilya, dan revolusi. Kemudian Rofit & Wilson dalam Budiarto, (1982) mengatakan bahwa bentuk partisipasi warga didasarkan pada intensitasnya, bahwa intensitas terendah adalah sebagai pengamat, intensitas sedang sebagai peserta, dan intensitas tertinggi adalah sebagai seorang aktivis, dalam Gambar 1. di bawah ini.

Gambar 1. Piramida Partisipasi Politik



Sumber: Budiarto, (1982)

Kelompok paling bawah pada gambar diatas yakni kelompok apolitis, yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Kemudian kelompok pengamat, kelompok partisipan dan kelompok yang paling atas adalah kelompok aktivis.

### **Perilaku Pemilih**

Perilaku pemilih ketika dilihat dari teori perilaku atau behavioral yang memusatkan perhatian pada tindakan politik individu yang menyoroti sejauh mana peran pengetahuan politik dipengaruhi oleh perilaku politik (Nasiwan, 2012). Behavioralis mencoba menjelaskan perilaku manusia dalam kegiatan politik. Teori sistem umum diyakini juga menjadi akar munculnya teori behaviorisme. Teori ini mengatakan bahwa motivasi utama untuk tindakan atau perilaku politik manusia adalah keinginan untuk melipatgandakan manfaat dari sesuatu yang bernilai (Nasiwan, 2012).

David Easton dalam Nasiwan (2012) mengungkapkan model psikologi, yang model ini berusaha memberikan pemahaman tentang perilaku yang menekankan proses pembelajaran oleh variabel-variabel seperti (1) Stimulus situasi yang membangkitkan tindakan di lingkungan; (2) Muncul semacam motivasi sehingga ia berupaya mendapatkan respons yang memuaskan; dan (3) variabel individu seperti keturunan, usia, jenis kelamin, kondisi dan isi yang menentukan bagaimana orang memahami peluang yang tersedia, dalam bentuk aksi politik seperti dukungan ketika memilih, untuk bergabung dengan partai politik, kelompok penekan atau gerakan. Dari sini David Easton mencoba menjelaskan bahwa teori perilaku berusaha menjelaskan bagaimana cara membuat, mengadaptasi, dan mempelajari perilaku yang berkaitan dengan tindakan politik seseorang. Sementara itu, jika dilihat dari teori pilihan rasional James S. Coleman dalam George, (2007) mengatakan bahwa teori pilihan rasional terbukti dalam gagasan dasar bahwa tindakan seseorang mengarah dengan jelas pada tujuan dan sasaran ditentukan oleh nilai-nilai atau pilihan. Ada dua elemen utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah hal-hal yang menarik perhatian dan dapat dikendalikan oleh aktor.

Teori pilihan rasional berfokus pada aktor. Menurut Ritzer (2000) aktor dipandang sebagai manusia yang memiliki maksud atau tujuan. Ini



berarti bahwa aktor memiliki tujuan untuk mencapai tujuan, selain itu aktor juga memiliki nilai dan pilihan. Teori ini tidak memandang apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi pilihan sumber aktor. Yang penting adalah bahwa aktor mengambil tindakan yang dimaksudkan. Menurut Cholisin (2007), pilihan rasional adalah aktivitas memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan alternatif berupa pilihan yang ada. Apabila teori ini dikaitkan dengan partisipasi politik masyarakat, maka masyarakat sebagai pemilih adalah aktor dalam Pilkada mempunyai tujuan tertentu menentukan partisipasinya. Tujuannya bermacam-macam bersikap masa bodoh, lebih mementingkan kepentingan pribadi, atau sebagai reaksi protes terhadap penyelenggara Pilkada yang tidak netral atau calon kandidat tidak sesuai dengan pilihannya.

#### **Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)**

Pada era kekuasaan yang masih di kendalikan Orde Baru, UUD 1945 sebelum diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan sepenuhnya oleh MPR” namun setelah era reformasi, UUD 1945 diamandemen sehingga pada pasal 1 ayat (2) ini menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka kepala daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkada sehingga pemerintahan yang terbentuk merupakan cerminan dari kehendak rakyat dan kedaulatan rakyat.

Pemilihan kepala daerah langsung adalah respons kritik yang konstruktif terhadap penerapan mekanisme demokrasi tidak langsung yang sering disebut sebagai demokrasi perwakilan. Ini berarti bahwa orang-orang tidak secara langsung mengartikulasikan berbagai kepentingan pada agenda kebijakan publik, tetapi lebih mewakili ke sejumlah kecil orang. Gagasan pemilihan kepala daerah langsung dinilai sebagai bentuk demokrasi langsung (Nadir, 2005). Namun, pemilu diadakan langsung di Indonesia, golput merajalela mewarnai pemilu di berbagai daerah. Penelitian Atiek Lestari, (2009) dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah pada 2008, menunjukkan bahwa pemilihan langsung bukan jaminan peningkatan partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik publik Purworejo menunjukkan skala yang rendah, karena hasil survei menunjukkan 88,4% lebih sedikit orang yang secara aktif berpartisipasi dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008. Sedangkan bentuk partisipasi yang dilakukan kebanyakan orang adalah memilih satu pasangan Cagub dan Cawagub.

Penelitian Andriyus tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif 2009 di Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa dua faktor mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif 2009 di Kecamatan Singing Hilir, faktor internal dan eksternal. Faktor yang paling dominan

mempengaruhi partisipasi politik publik pada faktor internal adalah kesadaran politik publik. Sedangkan faktor eksternal adalah perilaku kandidat (Andriyus, 2013).

Penelitian kolaboratif Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dan Program Studi Pemerintahan Unmuh Yogyakarta, yang dilakukan oleh Suranto, dkk (2015) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi di Kabupaten Bantul adalah afiliasi politik dengan orang-orang terdekat; stimulus partisipasi; kontrol sosial yang ketat sehingga perilaku yang tidak menggunakan hak pilih akan dianggap sebagai *ora umum*; pragmatisme politik masyarakat yang dikoordinasikan oleh RT / lembaga Dusun untuk mobilisasi pemilih; dan kesadaran kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan. Sementara faktor-faktor yang menghambat partisipasi publik dalam melaksanakan hak pilih dalam pemilihan adalah kejenuhan dan kurangnya manfaat langsung dari pelaksanaan pemilihan; keterbatasan sosialisasi dan kurangnya inovasi sosialisasi yang menarik bagi masyarakat; kinerja pemutakhiran data oleh penyelenggara pemilu belum optimal, terutama di wilayah yang luas dan mobilitas penduduk yang tinggi, karena cakupan wilayah yang luas dan mobilitas penduduk yang tinggi menjadikan pembaruan data sebagai masalah penting; ikatan dan kontrol sosial yang lemah; dan pragmatisme orang-orang yang melihat pemilu tidak menerima manfaat langsung.

Berbeda dengan hal yang ditemukan Nasution dalam penelitiannya tentang "Etnisitas, Demokrasi, dan Desentralisasi: Menjelaskan Partisipasi Politik Etnis dalam Pemilihan Langsung di Medan 2010". Fokus penelitiannya adalah peran identitas atau etnis dalam mempengaruhi dinamika pemilihan langsung pada tahun 2010 di Medan, Sumatera Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa pemilihan langsung di Medan, Sumatera Utara dibangun oleh kekuatan kolonial yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat (Nasution, 2014)

John Lappie dan Melissa Marschall melakukan penelitian yang meneliti bagaimana fitur geografis mempengaruhi partisipasi dalam politik dan pemilihan lokal di AS. Bahwa ada perbedaan tajam dalam tingkat partisipasi sepanjang pemilihan lokal dan negara bagian / federal, di mana '*sense of place*' mempengaruhi perilaku politik penduduk. Dalam studinya, ia melihat secara eksplisit bagaimana fitur geografis, fungsional, dan sosio-demografis kota membentuk partisipasi dan kontestasi dalam pemilihan lokal dengan menganalisis pemilihan walikota di dua negara bagian AS. Temuan penelitiannya menemukan bukti bahwa tidak hanya faktor kontekstual yang terkait dengan partisipasi dan kontestasi, tetapi fitur geografis itu sendiri harus mempengaruhi partisipasi dan kontestasi bahwa tingkat partisipasi yang lebih tinggi ditemukan di kota-kota yang masih diklasifikasikan sebagai pedesaan daripada tingkat partisipasi negara bagian dan federal, sehingga perhatian khusus diperlukan untuk proses dan hasil pemilu di daerah pedesaan (Lappie & Marschall, 2018).

Dari beberapa literatur penelitian sebelumnya, menemukan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat sesuai

dengan konteks dan kondisi wilayah atau daerah masing-masing. Sehingga penulis melakukan kajian dengan topik yang sama, namun terdapat beberapa perbedaan mendasar yaitu metode yang digunakan, lokus kajian dimana penelitian ini dilakukan di daerah perbatasan negara, karena masyarakat Indonesia di beranda negara sangat rentan terhadap pengaruh negara tetangga yang dapat melunturkan jiwa nasionalisme masyarakat perbatasan sehingga bisa berdampak pada disintegrasi bangsa. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kejadian di Kalimantan, dimana warga perbatasan mengibarkan bendera Malaysia dan mereka mengancam untuk menjadi negara Malaysia karena persoalan kemiskinan, ketimpangan distribusi dan manfaat pembangunan ekonomi, yang dialami oleh masyarakat perbatasan.

### **C. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna memperoleh gambaran yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat perbatasan pada pada Pemilu tahun 2015 di Kabupaten Malinau. Lokasi penelitian dipilih di Apau Kayan tepatnya di Kecamatan Kayan Hulu dan Kayan Hilir dengan pertimbangan bahwa kedua Kecamatan tersebut sama-sama berada di perbatasan Indonesia-Malaysia, namun tingkat partisipasi politik masyarakatnya sangat berbeda.

Data dan informasi dalam penelitian ini, diperoleh dari keterangan informan, pengamatan serta dokumen yang relevan (Moleong, 2008). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dan diperkuat dengan wawancara mendalam dengan informan kunci, studi dokumentasi serta pengamatan langsung dilapangan. FGD dilakukan untuk pengumpulan data secara induktif melalui diskusi interaktif di dalam kelompok yang di dalamnya interaksi pengetahuan dan pengembangan ide-ide yang kooperatif yang difokuskan pada permasalahan penelitian (Sugiono, 2008). Wawancara dilakukan secara mendalam atau terbuka dengan orang yang dianggap paling mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan topik yang dikaji untuk mengetahui gagasan para subjek penelitian mengenai pokok penelitian yang didukung oleh pedoman wawancara semi terstruktur. Sementara observasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan kecenderungan apa yang terjadi dilapangan penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif (Miles, et al. 2014) yang dilakukan dengan tahapan-tahapan setelah data di lapangan terkumpul maka data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasikan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, untuk kemudian dianalisis secara deskriptif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan**

Apau Kayan adalah daerah dengan beberapa kecamatan, yang dipersatukan oleh kelompok suku Kenyah dan Kayan. Tokoh adat besar IA mengungkapkan dalam FGD bahwa "daerah Apau Kayan memiliki sejarah

panjang dan posisi penting di daratan Kalimantan. Karena berbatasan dengan Sarawak, wilayah Apau Kayan dipilih oleh Belanda untuk menjadi daerah pertahanan pertama yang menghadapi keputusan Inggris di Malaysia. Pada masa kemerdekaan, pemuda Apau Kayan juga bertempur. Nama-nama para pejuang itu tertulis di monumen desa di Long Nawang, yang masih sangat terawat sampai sekarang. IA selanjutnya mengungkapkan bahwa, sejak Orde Baru, barang yang dibutuhkan oleh penduduk di wilayah Apau Kayan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, hampir 100% berasal dari Malaysia. Kami di Apau Kayan sangat dekat dan terbiasa memegang ringgit Malaysia."

Dipagari oleh alam, terutama pertemuan hutan yang lebat, Kabupaten Kayan Hulu dan Kayan Hilir menjadi semacam ghetto yang tidak mudah ditembus darat. Jalan setapak melalui sungai sering kali memiliki hambatan. Seperti di bagian lain Kalimantan, kendala utama adalah ketidakpastian kondisi sungai. Jika kondisi sungai bersahabat, yang menyebabkan naik ketinting (*speed boat*) melewati air, perjalanan ke pedalaman termasuk perbatasan tidak mudah untuk dilalui. Namun, ketika airnya dangkal atau sebaliknya arusnya terlalu deras, perjalanan seringkali harus ditunda atau dilanjutkan dengan sangat tersendat. Dalam beberapa kasus, sebagaimana dinyatakan dalam FGD, beberapa orang harus menunggu beberapa hari agar sungai kondusif untuk dilewati. Dengan kondisi seperti ini, jalur udara menjadi pilihan alternatif yang relatif mampu mengatasi hambatan hutan dan aliran sungai yang tidak menentu. Namun, rute udara juga tidak mudah. Kepastian ketersediaan penerbangan masih relatif tidak memadai mengingat terbatasnya jumlah pesawat. Ini ditambah dengan kapasitas minimum penumpang yang dapat diangkut, di mana tidak lebih dari 10 orang dapat dilayani dalam satu penerbangan. Belum lagi masalah cuaca yang seringkali kurang bersahabat sehingga mengganggu jadwal penerbangan.

Partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan, salah satunya adalah menentukan pemimpin melalui Pemilu atau Pilkada sangat penting bagi perubahan di tingkat lokal. Namun, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan hak pilihnya telah dipengaruhi oleh banyak hal, bahkan apatis. Pernyataan BK sebagai pemimpin masyarakat, yang mengatakan: "Saya memilih pasangan calon yang dapat memberikan perubahan bagi masyarakat Apau Kayan seperti pasangan calon yang berjanji untuk membangun jalan perbatasan Apau Kayan dan akan terus mensubsidi tiket pesawat dari Malinau ke desa kami. Tapi banyak yang tidak ingin tahu tentang pemilihan karena mereka mengatakan barang yang dibutuhkan oleh orang-orang di sini sebagian besar dari Malaysia, jadi mereka ingin memilih jika Malaysia mengadakan pemilihan. Itulah yang saya alami ketika pada hari pemungutan suara, beberapa dari orang-orang yang saya temui di jalan tidak ingin memilih, alasannya, siapa pun bupati kita, kita akan terus seperti ini. Daripada membuang-buang waktu, lebih baik pergi ke ladang (FGD, 27 Juli 2019).

Hal yang sama, terungkap salah seorang pemimpin pemuda Apau Kayan RT, yang juga merupakan salah satu Tim Presidium DOB untuk Apau Kayan, mengatakan bahwa daerah perbatasan memiliki potensi penambangan

emas yang saat ini ditambang oleh masyarakat perbatasan dengan pola penambangan komunitas yang kemudian dijual ke Malaysia. Selain penambangan emas, daerah Apau Kayan yang luas dan subur memiliki potensi besar untuk tanaman, tetapi tidak ada akses untuk menjual produk pertanian masyarakat, sehingga hasilnya hanya untuk konsumsi lokal. Artinya, masyarakat perbatasan sangat potensial untuk sejahtera, tetapi perhatian pemerintah masih minim sebelum program Nawacita. Sehingga kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi politik masyarakat Apau Kayan dalam pemilu 2015, karena persepsi masyarakat bahwa memilih dan tidak memilih tidak mempengaruhi pembangunan. Bagaimanapun, kami akan terus seperti ini juga.

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian kolaboratif Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Suranto, dkk (2015), bahwa faktor-faktor yang menghambat partisipasi publik dalam melaksanakan hak pilih dalam pemilihan adalah kejenuhan dan kurangnya dukungan langsung manfaat dari pelaksanaan pemilu. Jadi ini memperkuat teori pilihan rasional Cholisin di mana aktivitas memilih sebagai produk perhitungan untung dan rugi. Teori ini dimulai dengan asumsi dasar bahwa setiap masyarakat terdiri dari individu yang bertindak untuk mencapai dan memaksimalkan minat mereka (*utility maximizer*) (Donald Green dan Ian Shapiro, 1996). Pilihan itu masuk akal (pilihan rasional), karena kodrat manusia itu egois. Dengan demikian, pemilu adalah tahap di mana berbagai aktor bersaing satu sama lain untuk mengeruk berbagai sumber yang ada.

Tidak mengherankan bahwa "Garuda di dadaku, Malaysia di perutku" pada awalnya adalah lelucon, tetapi menjadi moto umum bagi penduduk perbatasan di wilayah Kayan Hulu dan Kayan Hilir (Apau Kayan), Kabupaten Malinau. Dalam FGD terungkap bahwa produk dalam negeri membanjiri wilayah Apau Kayan ketika musim kemarau tiba, tetapi selama musim hujan, produk dalam negeri sangat sedikit dibanding produk dari Malaysia. Warga terpaksa kembali ke produk tetangga, baik makanan, maupun bahan bakar minyak, karena akses jalan ke Long Bagun, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur pasti akan mengalami kerusakan parah menerjang lumpur pada musim hujan, sehingga bisa memakan waktu hingga satu minggu atau lebih. Bahkan harus menghabiskan waktu bermalam di jalan atau hutan belantara. Dengan demikian, penduduk mau tidak mau harus kembali ke produk Malaysia untuk memenuhi kebutuhan, karena jarak dari Apau Kayan ke wilayah Malaysia dapat ditempuh sekitar satu jam.

Moto komunitas perbatasan menarik untuk dicatat, sejauh ini orang-orang Apau Kayan memiliki semangat nasionalisme yang kuat dan sangat bangga dengan Indonesia melalui moto "Garuda di dadaku", sebagai bentuk pengakuan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia yang tetap setia kepada Indonesia menjadi patok hidup perbatasan untuk menjaga keutuhan NKRI. Tetapi sangat memprihatinkan ketika kita mendengar sambungan dari moto tersebut yang mengatakan "Malaysia di perutku" yang menyiratkan bahwa darah yang mengalir dalam pembuluh darah masyarakat perbatasan adalah darah Malaysia. Karena hampir 100% dari kebutuhan dasar yang

dikonsumsi oleh masyarakat perbatasan Apau Kayan dibawa dari Malaysia. Sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat perbatasan dalam setiap proses pemilihan termasuk Pilkada.

Selain persoalan tersebut, *money politik* juga massif terjadi. Diakui atau tidak *money politic* merupakan momok yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia. Walau belum ada definisi yang jelas berkaitan dengan politik uang, tetapi setidaknya ada empat hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan politik uang. Pertama, *vote buying* atau membeli suara. Kedua, *vote broker* atau orang/kelompok orang yang mewakili kandidat untuk membagikan uang/ barang. Ketiga, uang atau barang yang akan dipertukarkan dengan suara. Keempat, pemilih dan penyelenggara pemilihan yang menjadi sasaran politik uang (Irawan, et al, 2014).

Pernyataan BA dalam FGD bahwa: “dalam memberikan suara politik khususnya pada Pilkada 2015 lalu banyak yang mempengaruhi masyarakat khususnya pembagian sembako dan uang, yang dilakukan oleh tim sukses dari pasangan calon yang meminta masyarakat untuk memilih dengan imbalan dalam bentuk uang dan sembako yang membuat masyarakat menentukan pilihan. Hal ini membuat masyarakat ikut memilih karena ada imbalan. Bahkan tetangga saya mengatakan siapa yang memberikan uang itu yang dipilih untuk uang transportasi ke TPS dan konsumsi saat pemilihan (FGD, 27 Juli 2019).

Jika dilihat dari teori behavioral Niswani bahwa tindakan politik individu dilihat dari pengetahuan politiknya mempengaruhi perilaku politiknya sehingga motivasi utama tindakan atau perilaku politik manusia adalah hasrat untuk melipatgandakan kemanfaatan akan sesuatu yang bernilai. Tindakan seseorang untuk mencapai tujuan ditentukan oleh nilai atau pilihan, dimana seorang aktor atau kelompok kepentingan memiliki tindakan yang dapat memaksimalkan keinginan dan kebutuhan. Sehingga keterlibatan tim sukses tidak terpisahkan dalam memberikan akses negatif terhadap partisipasi masyarakat, dimana mereka terlibat langsung dan berkolaborasi dengan aktor lainnya.

Politik dan uang adalah dua hal yang berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena untuk politik orang membutuhkan uang dan dengan uang, orang dapat bermain politik. Ini karena politik adalah arena yang sangat menguntungkan untuk melakukan berbagai jenis transaksi yang disebut politik uang. Politik uang bukanlah hal baru bagi sistem demokrasi yang ada di Indonesia karena sejak awal pemilu telah digelar dan praktik-praktik seperti ini telah terjadi sehingga tentu saja harus diawasi bersama. Waspada dalam arti tidak berpartisipasi dalam praktik-praktik yang merusak proses demokrasi bangsa. Juga, uang politik dapat meremehkan pemilih, politisi, dan bahkan lembaga demokrasi yang ada di negara ini. Dari sinilah muncul berbagai jenis konflik berkepanjangan yang notabene mengganggu stabilitas nasional. Dengan demikian berbagai macam masalah yang disebabkan oleh uang politik termasuk situasi dan iklim politik menjadi tidak stabil. Dampak yang dihasilkan dapat menghilangkan peluang munculnya pemimpin daerah yang berkualitas, politik uang mempengaruhi

partisipasi politik masyarakat dalam pilkada dan pemilihan umum serta merusak demokrasi dan membahayakan masyarakat.

Demikian pula pernyataan yang di sampaikan oleh IA, bahwa “dalam melakukan pemilihan banyak yang mempengaruhi saya dan masyarakat sekitar, hal ini terjadi karena kekuasaan dengan mengikuti pilihan politik kepala desa. Jadi ikut kepala desa saja. Selain itu, ada pendapat yang berkembang bahwa kita memilih orang yang satu suku. Dan banyak juga yang tidak memilih karena jarak rumah dan TPS sangat jauh sehingga mereka memilih untuk berladang dan berkebun (FGD, 27 Juli 2019). Pernyataan berbeda disampaikan oleh NR yang menyatakan bahwa “kami satu keluarga tidak mendapatkan undangan yang C berapa itu pada pemilihan bupati lalu, sehingga kami tidak memilih. Suami saya mengatakan bahwa kita memilih pake KTP saja tapi saya tidak mau. Saya sampaikan ke suami saya, bapak aja yang pergi pakai KTP tapi dia juga tidak mau. Sehingga kami tidak memilih waktu itu (FGD, 27 Juli 2019).

Pemilu sebagai salah satu instrumen ideologi pemerintahan yang demokratis, namun prinsip-prinsip kebebasan dan memilih untuk penyalur kehendak masyarakat belum berjalan efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem politik yang berkembang telah memberikan dampak pada rendahnya partisipasi masyarakat di perbatasan. Upaya dan doktrin pembangunan nasional telah memfasilitasi elit lokal untuk melakukan eksploitasi daerah, yang membangun isu primordialisme, politik uang dan berbagai masalah lainnya. Pada kondisi tersebut masyarakat daerah memiliki peran politik yang rendah, dan kesejahteraan yang rendah bila dikaitkan dengan konteks sumberdaya alam yang melimpah di perbatasan. Dari berbagai pendapat yang disampaikan dalam FGD diatas, tampak bahwa partisipasi politik masyarakat di perbatasan dipengaruhi oleh beberapa hal yakni pertimbangan politik pragmatis, masalah ekonomi, administratif dan geografis.

Jika melihat kondisi masyarakat perbatasan Apau Kayan di Malinau Kalimantan Utara, yang sampai saat ini seakan tergantung pada negara tetangga, maka secara perlahan rasa nasionalisme akan luntur dan berdampak pada rendahnya kesadaran politik di wilayah perbatasan. Fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat lebih disebabkan oleh perlakuan pemerintah yang belum membangun secara maksimal di daerah perbatasan, karena sulitnya jangkauan pembinaan oleh pemerintah dan adanya peluang ekonomi di negara tetangga. Permasalahan yang terjadi selama ini yang menjadi faktor penghambat bagi masyarakat perbatasan adalah masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana menyalurkan keluhan mereka kepada pemerintah. Masyarakat, terutama suku Dayak lebih suka menghindar ke pedalaman manakala wilayah mereka terdegradasi. Kesenjangan akibat selisih kurs valuta, sarana dan prasarana darat, laut dan udara; sarana komunikasi dan informasi dengan Malaysia, melunturkan rasa nasionalisme dan kesadaran politik masyarakat perbatasan Kalimantan Utara, sehingga orientasi mereka dalam aspek ekonomi dan perdagangan lebih condong ke Pemerintah Negara Malaysia daripada ke Pemerintah Republik Indonesia.

Nasionalisme kebangsaan berperan dalam menyediakan rasa aman dan stabilitas, menciptakan kembali sentimen keutuhan dan kesinambungan dengan masa lalu antarwarga-negara. Menguatnya identitas lokal juga perlu dilihat sebagai strategi dalam merumuskan kembali nilai-nilai nasionalisme (Soebhan, et al, 2017). Oleh karena itu, perhatian pemerintah sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pembangunan di perbatasan. Lebih dari itu, masyarakat juga harus diberikan pendidikan politik dengan baik agar memiliki wawasan yang luas dan tidak mudah terpengaruh dengan kehidupan negara tetangga.

Dalam kaitannya dengan adanya faktor sosial, ekonomi dan kesenjangan tersebut, tingkat partisipasi dan orientasi politik masyarakat di perbatasan menjadi salah satu pemicu rendahnya partisipasi masyarakat. Di satu sisi, pergulatan ekonomi untuk menyambung kehidupan mereka sehari-hari dengan biaya hidup yang sangat tinggi, menyibukkan mereka dengan aktivitas masing-masing untuk pemenuhan kebutuhan, namun di sisi lain masyarakat perbatasan memiliki solidaritas etnis Dayak yang masih sangat kuat walaupun memiliki orientasi politik yang berbeda-beda. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat juga berbanding lurus dengan tingkat politik uang yang terjadi di beberapa wilayah. Jika dilihat dari orientasi politik masyarakat, maka faktor ekonomi juga termasuk kedalam salah satu penyebabnya. Meskipun politik uang termasuk ke dalam *rational choice*, namun praktik ini telah menodai semangat demokrasi. Istilah lain yang dikenal oleh masyarakat umum adalah “serangan fajar”, juga terjadi di Apau Kayan. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan oknum tertentu yang melakukan praktik politik uang ketika Pemilu berlangsung. Sasarannya adalah para pemilih yang lanjut usia, pemilih pemula, ataupun calon pemilih dengan pemahaman politik yang rendah. Meskipun demikian, faktor ekonomi bukanlah satu-satunya alasan yang mengangkat fenomena politik uang. Namun juga menjadi salah satu bentuk isyarat kekecewaan terhadap pemerintah. Sehingga keinginan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam politik menjadi berkurang bahkan hilang.

Berdasarkan data BPS pada tabel sebelumnya, tampak bahwa terjadi kesenjangan jumlah partisipasi dalam Pilkada di Kayan Hulu dan Kayan Hilir. Bahwa dari total 978 jiwa jumlah DPT pada tahun 2015 di Kayan Hilir, yang memberikan suaranya sebesar 848 jiwa. Yang berarti hanya 130 pemilih yang tidak memberikan hak suaranya. Sementara, jumlah DPT yang tersebar di seluruh wilayah Kayan Hulu pada tahun 2015, sebesar 2.276 jiwa namun hanya 1.162 jiwa yang memberikan suaranya untuk memilih pemimpinnya. Artinya ada sekitar 1.114 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa fenomena golput di Kayan Hulu sangat tinggi sebagai bentuk kekecewaan sebagian besar masyarakat terhadap pemerintah di wilayah Apau Kayan. Mereka cenderung tidak terlibat secara aktif tentang isu-isu yang terjadi di Indonesia, sehingga sikap politik golput masyarakat perbatasan juga mengindikasikan bahwa mereka skeptis dan telah kehilangan kesadaran sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang menentukan arah pemerintahan. Selain itu dalam FGD terungkap



bahwa sebagian besar masyarakat yang tidak menentukan hak pilihnya karena persoalan jarak dari tempat tinggal ke TPS relatif jauh. Sementara sarana dan prasarana transportasi belum menunjang.

Jika melihat tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan calon legislatif tahun 2019, berdasarkan data KPU Kabupaten Malinau 2019, dalam Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019, mengacu pada Model DB1-PPWP yang dipublikasikan di <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/rekapitulasi/>, bahwa pada Pemilu serentak tahun 2019, total pemilih di Kabupaten Malinau berjumlah 57.920 jiwa dengan rincian DPT, 52.505 jiwa, DPTb, 1.320 jiwa, DPK, 4.096 jiwa. Sementara yang menggunakan hak pilihnya sebesar 41.503 jiwa dengan persentase 71,65% dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 16.417 jiwa dengan persentase 28,35% (KPU RI, 2019).

Merujuk pada Model DB1-PPWP 2019 tersebut, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Malinau jika dibandingkan Pilkada tahun 2015, hanya meningkat sebesar 2,36%. Hal tersebut masih jauh dibawah rata-rata angka partisipasi pemilih secara nasional pada Pemilu 2019 yang di klaim oleh KPU bahwa terjadi peningkatan angka partisipasi pemilih jika dibandingkan pemilu 2014 sebagaimana di beritakan Kompas.com bahwa partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 81% dengan peningkatan angka partisipasi hampir 10 persen dari tahun 2014. Pada tahun 2014 angka partisipasi pemilih secara nasional dalam pilpres sebesar 70% dan pileg 2014 sebesar 75% (Kompas.com, 2019).

Melihat data diatas, antusiasme masyarakat dalam pemilu untuk memilih presiden bahkan bupati relatif rendah jika dibandingkan pemilihan legislatif. Hal demikian juga terjadi di Malinau. DPT pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan signifikan, dimana pada tahun 2015 angka DPT di Kabupaten Malinau sebesar 51.033 jiwa, sementara tahun 2019 angka DPT sebesar 52.505 jiwa, yang berarti ada peningkatan DPT sebesar 1.472 jiwa pemilih namun tingkat partisipasi pemilih hanya meningkat sebesar 2,36% dalam kurun waktu 4 tahun.

Namun jika dibandingkan pada pemilihan Bupati Periode 2011-2016 Kabupaten Malinau, berdasarkan data KPU 2011 dalam Malinau dalam angka 2014, jumlah wajib pilih sebesar 41.221 jiwa, sementara yang menggunakan hak pilihnya sebesar 34.140 jiwa (82,82%). Melihat angka tersebut, tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi di atas 80 persen namun mengalami penurunan drastis pada Pilkada langsung tahun 2015. Walaupun berbicara partisipasi tidak selalu mengacu pada angka-angka, tetapi bagaimana menanggapi partisipasi yang berkualitas yang dapat dilihat dari proses pemilu yang sudah berjalan dengan baik. Karena itu, tingkat partisipasi masyarakat dari pemilu ke pemilu di kabupaten Malinau cenderung fluktuatif, sehingga KPU perlu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Tingkat partisipasi pemilih bukan satu hal yang berdiri sendiri, namun dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagaimana yang terjadi di perbatasan. Diantaranya, sosial ekonomi, politik, administratif dan geografis. Sehingga

semua pihak (pemerintah, penyelenggara, peserta pemilu, masyarakat, adm) sadar akan peran masing-masing, maka niscaya akan meningkatkan partisipasi pemilih dan terlaksana pemilu yang semakin berkualitas.

Selain tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung fluktuatif dan masifnya *money politic* masalah yang kerap muncul dalam setiap pesta demokrasi adalah terpeliharanya perpecahan horizontal karena perbedaan pilihan pada Pemilu, munculnya kerusuhan karena hasil pemungutan suara yang tidak bisa diterima peserta, sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015 di Malinau, serta di beberapa daerah lain di Indonesia. Bahkan Pemilu 2019, membuat masyarakat terpolarisasi, yang hingga saat ini dampaknya masih terasa. Sehingga dampak negatif Pemilu harus segera diatasi agar tidak menimbulkan perpecahan yang lebih besar di tengah masyarakat, karena butuh waktu lama untuk bisa diperbaiki. Jika potensi perpecahan masyarakat akibat Pemilu tidak kunjung diselesaikan, maka partisipasi pemilih yang tinggi menjadi tidak ada gunanya. Pasalnya, kenaikan partisipasi ternyata diikuti dengan terjadinya segregasi kelompok-kelompok tertentu di masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa, KPUD Malinau dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas penyelenggaraan pemilu memiliki tantangan dan beban yang besar. Sehingga salah satu upaya yang bisa dilakukan, adalah melalui kerjasama dengan berbagai pihak, agar bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas pemilu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghasilkan penyelenggaraan pemilu berkualitas melalui sosialisasi yang menjangkau masyarakat sampai ke tingkat RT hingga perbatasan dan melakukan pendidikan politik, agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu bisa meningkat, dan dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pemilu yang menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Karena itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam politik, khususnya masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia di Apau Kayan, maka diperlukan upaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pemilu.

### **Pendidikan Politik**

Pemerintah, partai politik dan penyelenggara sebagai komponen penting dalam pemilu, juga membutuhkan dukungan dari rakyat, sehingga pendidikan politik melalui partai politik dan penyelenggara pemilu adalah salah satu metode yang dibutuhkan. Partai politik memiliki kepentingan dalam mendorong tingkat partisipasi politik masyarakat, karena masyarakat merupakan faktor utama dalam mempertahankan keberadaan partai. Jadi kita perlu peran berkelanjutan antara partai politik dan masyarakat melalui pendidikan politik.

Komunitas perbatasan yang masih memegang adat istiadat, dan belum tersentuh oleh pendidikan, adalah target utama pendidikan politik. Ini juga menyebabkan tingkat kerentanan tinggi terhadap politik uang di perbatasan. Sehingga upaya dalam memberikan pemahaman kepada publik tentang Pemilu dan pentingnya hak pilihnya sangat diperlukan. Upaya ini juga perlu didukung dengan pendidikan sejak usia dini. Pendidikan politik akan berjalan

dengan baik, jika ada kesinambungan antara pendidikan di sekolah dan di masyarakat. Diharapkan bahwa ini juga akan mengembangkan pemahaman dan partisipasi masyarakat yang sehat tanpa paksaan. Sehingga publik bisa kritis dalam memilih partai dan pemimpinnya dalam pemilihan.

Melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, interaksi dan timbal balik antara lembaga-lembaga regional akan muncul. Masyarakat dapat mengenali dan memahami mekanisme dan sistematis, serta prosedur dan peran partai politik dalam pemerintahan. Adanya pendidikan politik yang setara di setiap wilayah akan memudahkan pengaturan dan peningkatan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan politik juga memberikan pemahaman tentang peran dan tugas warga negara dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Otonomi daerah yang diterapkan oleh Indonesia, menuntut warga negara yang benar-benar aktif dalam mengembangkan daerahnya.

Wilayah perbatasan Indonesia di Malaysia di Apau Kayan memiliki potensi untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan politik. Partisipasi dan inisiatif masyarakat akan membantu pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, pendidikan politik juga perlu mencakup dan melindungi pemilih pemula. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemilih pemula adalah kurangnya pendidikan dan pemahaman politik. Generasi muda sebagai pemilih pemula perlu bimbingan, dan pemahaman untuk menentukan orientasi politik mereka. Ini juga mengingatkan semakin banyaknya pemilih pemula di Apau Kayan di setiap acara pemilihan. Kurangnya pendidikan politik sejak usia dini akan menyebabkan apatis dan berkurangnya peran masyarakat. Pemilu yang tidak jujur juga akan melahirkan pemimpin yang korup, karena kekuasaan didapatkan dari proses yang menyimpang dari jalur demokrasi. Sehingga kesan yang muncul, bahwa proses Pemilu atau Pilkada hanya sebagai proses penggantian pemimpin yang sarat dengan intrik politik kekuasaan. Sehingga rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, akan merugikan perkembangan pemerintahan dan implementasi otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu ada peran dan koordinasi yang baik, antara Badan Penyelenggara Pemilu, partai politik atau lembaga regional dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil melalui pendidikan politik.

Pendidikan politik bisa dalam bentuk sosialisasi politik sebagai proses dimana seseorang dapat memperoleh sikap dan orientasi politiknya. Proses sosialisasi dapat berlangsung seumur hidup yang mulai berkembang melalui keluarga. Partai politik berperan sebagai sarana sosialisasi massa. Ini bisa dilakukan melalui media massa, seminar, atau kursus kader. Di sisi lain, sosialisasi oleh partai politik juga merupakan bentuk citra yang disampaikan kepada publik bahwa pihaknya memperjuangkan kepentingan publik. Ini juga berkaitan dengan tujuan partai politik untuk mengendalikan pemerintah melalui pemilihan umum. Bahwa partai politik harus mendidik anggotanya untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan menempatkan

kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan menumbuhkan identitas dan integritas nasionalisme.

Dalam masyarakat heterogen, potensi konflik akan selalu ada, baik dari segi etnis, etnis, atau agama. Perbedaan dan perselisihan akan selalu muncul dalam masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Tetapi akan berbeda jika itu terjadi di lingkungan wilayah dengan orang-orang yang hidup dengan multikulturalisme. Fungsi dan peran partai politik diperlukan untuk mengatur dan menekan potensi konflik. Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dan pemerintah. Selain itu, partai politik juga perlu menyeimbangkan dan mendukung setiap masalah yang berkembang di masyarakat, baik itu masalah sosial, ekonomi atau budaya. Partisipasi ini juga penting mengingat fungsi partai serta media untuk penjangkauan dan komunikasi publik. Namun juga tidak jarang, peran ini menjadi sulit diwujudkan, karena partai politik juga lebih mementingkan kepentingan kelompok. Sikap partai semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik dan meningkatkan konfrontasi antara komunitas atau kelompok kepentingan.

#### **Peran Media Massa**

Di era sekarang ini, peran media telah menjadi sangat berpengaruh di masyarakat, baik cetak maupun media elektronik. Keberadaan media elektronik yang semakin berkembang, perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mensosialisasikan pemilu. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa media berperan dalam membentuk stigma di masyarakat tentang bagaimana jalannya suatu pemerintahan dan kebijakan diambil oleh pemerintah. Sehingga pemahaman politik dan orientasi rakyat juga dipengaruhi oleh pola pikir mereka terhadap situasi politik yang terjadi yang diperoleh dari media informasi.

Namun demikian, media komunikasi juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan pembangunan budaya demokrasi seperti edukasi dan sosialisasi. Sosialisasi ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Jika langsung, itu bisa dilakukan dengan pengenalan mekanisme pemilu melalui seminar atau kegiatan yang dikoordinasikan dengan organisasi masyarakat. Penyelenggara Pemilu juga dapat melakukan ini melalui media tidak langsung dengan memanfaatkan media Internet. KPU dapat menyiapkan situs web di internet yang berisi rekam jejak masing-masing kandidat, baik dalam pemilihan legislatif, eksekutif atau presiden. Disertai dengan pentingnya masyarakat untuk terlibat aktif dalam setiap pemilu atau Pilkada.

Namun, perlu dicatat bahwa media seperti radio, televisi dan surat kabar harus objektif dalam menggambarkan situasi politik yang terjadi. Sehingga tidak membingungkan masyarakat saat memproses informasi yang mereka terima. Media harus mampu membangun dan menjembatani realitas yang terjadi dan melepaskan kecenderungan terhadap satu figur atau partai politik. Revolusi media yang informatif, obyektif, dan edukatif sangat dibutuhkan mengingat pengaruh besar media dalam membentuk opini publik.

## E. PENUTUP

Tingkat partisipasi pemilih bukan satu hal yang berdiri sendiri, namun dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagaimana yang terjadi di perbatasan. Rendahnya partisipasi politik masyarakat perbatasan negara dalam pilkada serentak di Kabupaten Malinau 2015, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi sosial ekonomi, administratif, geografis dan apatisme masyarakat yang merasa terkucilkan di beranda negara. Fenomena rendahnya partisipasi politik masyarakat lebih disebabkan oleh perlakuan pemerintah yang belum membangun secara maksimal di daerah perbatasan, karena sulitnya jangkauan pembinaan oleh pemerintah dan adanya peluang ekonomi di negara tetangga sehingga faktor sosial, ekonomi dan kesenjangan tersebut berdampak pada tingkat partisipasi dan orientasi politik masyarakat di perbatasan sebagai isyarat kekecewaan terhadap pemerintah. Sehingga keinginan untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam politik menjadi berkurang bahkan hilang. Sebagian lainnya tidak menentukan hak pilihnya karena persoalan jarak dari tempat tinggal ke TPS relatif jauh, sementara sarana dan prasarana transportasi belum menunjang di perbatasan. Sehingga pendidikan politik perlu jadi perhatian para pemangku kepentingan memberikan edukasi bagi masyarakat agar nasionalisme mereka tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyus. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. *Journal of Government, Social and Politics*.
- Budiardjo, M. (Ed.). (1981). Partisipasi dan partai politik: sebuah bunga rampai. Penerbit PT Gramedia.
- Cholisin, dkk. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press. Yogyakarta.
- Coleman, J. S. (2011). Dasar-Dasar Teori Sosial, terj. Derta Sri Widowati, Bandung: Nusa Media.
- Damsar. (2012). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana
- Gaung Online, Lembaga Adat Dayak Kab Malinau Desak Penuntasan Kasus Pelanggaran Dan Kecurangan PILKADA Malinau 2015. Retrieved from <https://bit.ly/2Bpz6xD>, 7/8/2018.
- George, R., & Barry, S. (2012). Handbook Teori Sosial. Jakarta: Nusa Media.
- Goodman, J. Douglas-Ritzer George. (2008). Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gosnell, H. F. (1927). *The German Referendum on the Princes' Property*. *American Political Science Review*, 21(1), 119-123.
- Green, D., & Shapiro, I. (1996). *Pathologies of rational choice theory: A critique of applications in political science*. Yale University Press.
- Irawan, Ade; Dahlan, Abdullah; Fariz, Donal; Putri, A. (2014). *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Retrieved from [https://antikorupsi.org/sites/default/files/Panduan\\_Pemantauan\\_Korupsi\\_Pemilu.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/Panduan_Pemantauan_Korupsi_Pemilu.pdf)

- Kompas.com, 2019. KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>. (23/07/2019).
- KPU RI, 2019. Rekapitulasi Hasil Pemilu Legislatif DPRD 2019 Kab. Malinau-Prov. Kalimantan Utara. Retrieved <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/rekapitulasi/>
- Lappie, J., & Marschall, M. (2018). *Place and participation in local elections. Political Geography*. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.02.003>
- Lestari, A. (2009). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 (Studi Tentang Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kalangan Masyarakat Kabupaten Purworejo) (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Mas'ood, M. Mohtar dan Colin MacAndrews, (2006). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mcclosky, Herbert. 1968. 'Political Participation' dalam *International Encyclopedia of Social Science*. New York. Vol.12, halaman 252-65.
- Moleong, Lexy.J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- BPS, (2017). Malinau Dalam Angka, 2016.
- BPS, (2019). Malinau Dalam Angka, 2018.
- Miles Matthew, B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, a Methods Sourcebook* Edisi Ketiga.
- Nadir, A. (2005). Pilkada Langsung dan masa depan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasiwan, (2012). Teori-Teori Politik. Yogyakarta: Ombak
- Rahman, A. HI (2007). Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ratna Juwita, (2015). Sarat Pelanggaran, Ribuan Massa Duduki KPUD Malinau. Retrieved from <https://bit.ly/2vTJJna> (07/08/2018).
- Soebhan, S. R., Jati, W. R., Andriana, N., Noor, F., & Adam, A. W. (2017). Relasi nasionalisme dan globalisasi kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tingsten, H. (1937). *Political behavior: Studies in election statistics* (No. 7). PS King.